

Penguatan pendidikan antikorupsi melalui integrasi kurikulum dan budaya Sekolah

Yunita Nuryatin

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: yunitanuryatin567@gmail.com

Kata Kunci:

pendidikan antikorupsi, integrasi kurikulum, budaya sekolah, pendidikan karakter, integritas

Keywords:

anti-corruption education, curriculum integration, school culture, character education, integrity

ABSTRAK

Pendidikan antikorupsi penting diterapkan sejak dini karena korupsi tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga menunjukkan lemahnya karakter, integritas, dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka atau library research. Data diperoleh melalui kajian terhadap jurnal, artikel ilmiah, buku, dan dokumen yang relevan dengan pendidikan antikorupsi, pendidikan karakter, kurikulum, dan budaya sekolah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa integrasi pendidikan antikorupsi dapat dilakukan melalui tujuan pembelajaran, materi, metode, perangkat ajar, dan penilaian. Selain itu, budaya sekolah berperan sebagai ruang praktik nilai antikorupsi melalui

keteladanan, aturan yang adil, larangan menyontek, transparansi kas kelas, kantin kejujuran, dan kegiatan OSIS. Model penguatan pendidikan antikorupsi perlu dibangun melalui keterpaduan kurikulum, budaya sekolah, keteladanan, dan partisipasi warga sekolah. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi tidak berhenti sebagai teori, tetapi menjadi kebiasaan nyata dalam kehidupan sekolah

ABSTRACT

Anti-corruption education is important to implement from an early age because corruption is not only related to legal violations but also indicates weak character, integrity, and social responsibility. This study used a descriptive qualitative method with a library research approach. Data were obtained through a review of journals, scientific articles, books, and documents relevant to anti-corruption education, character education, curriculum, and school culture. The results of the discussion indicate that the integration of anti-corruption education can be achieved through learning objectives, materials, methods, teaching tools, and assessments. Furthermore, school culture serves as a practical space for anti-corruption values through role models, fair rules, a prohibition on cheating, transparency of class funds, an honest canteen, and student council activities. A model for strengthening anti-corruption education needs to be built through an integration of the curriculum, school culture, role models, and participation of the school community. Thus, anti-corruption education does not remain a theory but becomes a real habit in school life.

Pendahuluan

Korupsi merupakan persoalan serius yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga menunjukkan lemahnya karakter, integritas, dan tanggung jawab sosial. Sekolah memiliki peran penting dalam menanamkan nilai antikorupsi sejak dini kepada peserta didik. Pendidikan antikorupsi perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum dan budaya sekolah agar tidak berhenti sebagai teori. Nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, keberanian, dan kepedulian perlu ditanamkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, siswa dapat terbiasa menolak perilaku curang dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum dilakukan dengan memasukkan nilai antikorupsi ke dalam tujuan, materi, metode, perangkat ajar, dan penilaian pembelajaran. Pendidikan antikorupsi dapat diterapkan melalui



berbagai mata pelajaran seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, IPS, Bahasa Indonesia, dan Sejarah. Selain kurikulum, budaya sekolah juga menjadi ruang praktik nilai antikorupsi melalui keteladanan, aturan yang adil, larangan menyontek, transparansi kas kelas, kantin kejujuran, dan kegiatan OSIS. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi harus dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh warga sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum sekolah; bagaimana budaya sekolah memperkuat nilai antikorupsi peserta didik; dan bagaimana model penguatan pendidikan antikorupsi melalui integrasi kurikulum dan budaya sekolah. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum, menganalisis peran budaya sekolah dalam memperkuat nilai antikorupsi, serta merumuskan model penguatan pendidikan antikorupsi yang terpadu. Model tersebut mencakup kurikulum, budaya sekolah, keteladanan, dan partisipasi warga sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka atau *library research*. Metode ini digunakan untuk menggambarkan penguatan pendidikan antikorupsi melalui integrasi kurikulum dan budaya sekolah secara sistematis. Data diperoleh melalui kajian terhadap jurnal, artikel ilmiah, buku, dan dokumen yang relevan dengan pendidikan antikorupsi, pendidikan karakter, kurikulum, dan budaya sekolah. Data dianalisis secara deskriptif untuk menemukan konsep, pola, dan model penguatan pendidikan antikorupsi. Dengan pendekatan ini, pembahasan disusun berdasarkan kajian teoritis dan penelitian terdahulu yang relevan.

Pembahasan

Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum

Integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum menjadi strategi penting untuk menanamkan nilai integritas sejak dini. Pendidikan antikorupsi tidak cukup diberikan sebagai materi tambahan, tetapi harus masuk dalam tujuan, materi, metode, dan penilaian pembelajaran. Nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, keberanian, dan kepedulian perlu ditanamkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami bahaya korupsi secara teori, tetapi juga terbiasa menolak perilaku curang dalam kehidupan sehari-hari. Najih & Wiryani (2021) menegaskan bahwa kurikulum antikorupsi penting untuk membentuk karakter dan kesadaran hukum siswa. Pendidikan antikorupsi dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada tanpa harus menjadi mata pelajaran tersendiri. PPKn, Pendidikan Agama, IPS, Bahasa Indonesia, dan Sejarah dapat menjadi ruang untuk membahas nilai integritas, hukum, tanggung jawab sosial, dan dampak korupsi. Dalam PPKn, siswa dapat mempelajari hubungan korupsi dengan lemahnya pelayanan publik dan pelanggaran hak warga negara. Dalam Bahasa Indonesia, siswa dapat menulis teks bertema kejujuran dan antikorupsi. Wirabhakti (2020) menjelaskan bahwa nilai antikorupsi dapat diintegrasikan melalui mata pelajaran, kegiatan sekolah, pembiasaan, dan budaya sekolah.

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru perlu menggunakan metode yang kontekstual dan dekat dengan kehidupan siswa. Studi kasus, diskusi, simulasi, refleksi, dan pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan untuk membangun kesadaran antikorupsi. Siswa dapat diajak menganalisis perilaku menyontek, penyalahgunaan uang kas kelas, manipulasi tugas, atau ketidakjujuran dalam antrean. Melalui cara ini, siswa memahami bahwa perilaku koruptif dapat berawal dari kebiasaan kecil yang dianggap biasa. Komalasari & Saripudin (2015) menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi efektif jika dihubungkan dengan pembelajaran kewarganegaraan, modul, kantin kejujuran, dan iklim sekolah. Integrasi pendidikan antikorupsi juga perlu tampak dalam perangkat ajar dan sistem penilaian. Guru dapat memasukkan nilai

antikorupsi dalam capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, modul ajar, bahan ajar, dan instrumen evaluasi. Penilaian tidak hanya mengukur pemahaman siswa tentang korupsi, tetapi juga sikap jujur, disiplin, adil, dan bertanggung jawab. Bentuk penilaian dapat berupa observasi sikap, refleksi tertulis, portofolio, atau proyek kelompok. Yuliani & Muslim (2024) menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi memiliki hubungan erat dengan pendidikan karakter karena sama-sama membentuk nilai moral siswa.

Kurikulum Merdeka memberikan peluang besar bagi sekolah untuk mengembangkan pendidikan antikorupsi secara fleksibel. Melalui pembelajaran berbasis proyek, sekolah dapat membuat kegiatan seperti kampanye antimenyontek, pengelolaan kas kelas secara transparan, audit sederhana kegiatan OSIS, atau media edukasi antikorupsi. Kegiatan tersebut sejalan dengan Profil Pelajar Pancasila, terutama nilai berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dengan proyek nyata, siswa tidak hanya mendengar nilai antikorupsi, tetapi juga mempraktikkannya. Kholid et al. (2025) menyebut bahwa Kurikulum Merdeka membuka ruang integrasi nilai antikorupsi, meskipun masih membutuhkan kesiapan guru dan bahan ajar. Namun, pelaksanaan integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian guru belum memahami cara menghubungkan nilai antikorupsi dengan materi pelajaran secara tepat. Akibatnya, pendidikan antikorupsi sering hanya menjadi nasihat moral, bukan bagian dari pembelajaran yang terencana. Selain itu, pendidikan antikorupsi masih sering dianggap sebagai tanggung jawab PPKn atau Pendidikan Agama saja. Padahal, nilai antikorupsi harus ditanamkan secara lintas mata pelajaran dan didukung seluruh warga sekolah. Siregar & Chastanti (2022) menemukan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi belum optimal karena strategi pembelajaran dan integrasi nilai belum berjalan maksimal.

Penguatan Nilai Antikorupsi melalui Budaya Sekolah

Penguatan nilai antikorupsi melalui budaya sekolah merupakan upaya membentuk kebiasaan jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Budaya sekolah menjadi ruang praktik nyata agar pendidikan antikorupsi tidak hanya dipahami sebagai teori di kelas. Melalui pembiasaan yang konsisten, siswa dapat belajar bahwa perilaku kecil seperti tidak menyontek, tidak berbohong, antre, dan menjaga amanah merupakan bagian dari sikap antikorupsi. Gufron (2022) menegaskan bahwa internalisasi nilai antikorupsi perlu dilakukan melalui budaya lembaga agar perilaku antikorupsi terbentuk secara maksimal. Budaya sekolah yang antikorupsi dapat dibangun melalui keteladanan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Siswa akan lebih mudah meniru nilai integritas apabila melihat warga sekolah bersikap jujur, tepat waktu, adil, dan bertanggung jawab. Keteladanan tersebut penting karena pendidikan karakter tidak cukup hanya disampaikan melalui nasihat, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Tharaba (2020) menunjukkan bahwa budaya akademik dan pembiasaan di lingkungan pendidikan dapat membentuk karakter siswa melalui kegiatan rutin, kedisiplinan, dan nilai religius.

Selain keteladanan, sekolah perlu menciptakan aturan yang adil dan transparan. Tata tertib harus diterapkan kepada semua siswa tanpa pilih kasih agar mereka memahami nilai keadilan dan tanggung jawab. Praktik sederhana seperti transparansi uang kas kelas, kejujuran dalam ujian, pengelolaan tugas kelompok, serta larangan manipulasi data dapat menjadi sarana pembentukan budaya antikorupsi. Bashith (2015) menekankan pentingnya menumbuhkan budaya jujur dan antikorupsi dalam satuan pendidikan karena masih terdapat perilaku manipulasi dan kecurangan akademik. Budaya sekolah juga dapat diperkuat melalui kegiatan pembiasaan dan program partisipatif. Kantin kejujuran, kotak temuan barang hilang, pemilihan pengurus kelas secara demokratis, kegiatan OSIS, serta proyek sosial dapat melatih

siswa untuk bersikap amanah dan bertanggung jawab. Kegiatan seperti ini membuat siswa terlibat langsung dalam praktik integritas, bukan hanya mendengar penjelasan guru. Mulyoto (2020) membuktikan bahwa pembelajaran berbasis Project Citizen efektif menanamkan sikap dan keterampilan antikorupsi karena menggabungkan teori, praktik, portofolio, dan refleksi pengalaman belajar.

Penguatan budaya antikorupsi di sekolah perlu dilakukan secara kolektif oleh seluruh warga sekolah. Nilai antikorupsi akan lebih kuat apabila diterapkan dalam hubungan guru dengan siswa, siswa dengan teman sebaya, serta sekolah dengan orang tua. Lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang menolak kebiasaan curang, manipulatif, dan tidak bertanggung jawab. Wahyuni (2011) menyatakan bahwa korupsi yang telah menjadi budaya perlu dilawan dengan budaya tandingan, yaitu budaya antikorupsi yang dapat dikembangkan melalui pendidikan di keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Model Penguatan Pendidikan Antikorupsi

Model penguatan pendidikan antikorupsi perlu dibangun secara terpadu antara kurikulum, budaya sekolah, keteladanan, dan partisipasi warga sekolah. Kurikulum berfungsi memberi pemahaman tentang nilai integritas, sedangkan budaya sekolah menjadi ruang pembiasaan perilaku jujur dan bertanggung jawab. Nilai antikorupsi tidak cukup diajarkan secara teoritis, tetapi perlu dihidupkan dalam praktik harian siswa. Faslah (2025) menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya simbol, tetapi pedoman hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi perlu berlandaskan nilai Pancasila sebagai dasar pembentukan karakter siswa. Model pertama adalah integrasi nilai antikorupsi dalam pembelajaran. Guru dapat memasukkan nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, disiplin, dan keberanian dalam tujuan, materi, metode, serta penilaian pembelajaran. Setiap mata pelajaran dapat menjadi ruang penanaman integritas, bukan hanya PPKn atau Pendidikan Agama. Pembelajaran juga perlu dikaitkan dengan masalah nyata, seperti menyontek, manipulasi tugas, dan penyalahgunaan amanah. Faslah (2025) menjelaskan bahwa Pendidikan Pancasila berperan dalam membentuk karakter bangsa dan mengaktualisasikan nilai luhur dalam kehidupan.

Model kedua adalah penguatan budaya sekolah antikorupsi. Sekolah perlu membangun kebiasaan jujur melalui aturan yang adil, transparansi kegiatan, kedisiplinan, dan keteladanan guru. Budaya sekolah menjadi sarana agar siswa terbiasa mempraktikkan nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya melalui kantin kejujuran, larangan menyontek, pengelolaan kas kelas secara terbuka, dan pemilihan pengurus kelas secara demokratis. Hady et al. (2025) menunjukkan bahwa nilai dapat hidup kuat jika diinternalisasikan dalam praktik sosial dan budaya. Model ketiga adalah keteladanan dan partisipasi seluruh warga sekolah. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, dan orang tua perlu terlibat dalam membangun lingkungan yang menolak perilaku curang. Keteladanan menjadi penting karena siswa lebih mudah meniru perilaku nyata daripada hanya menerima nasihat moral. Sekolah juga perlu melibatkan siswa dalam kegiatan OSIS, proyek sosial, dan kampanye integritas. (Faslah, 2025) menempatkan Pancasila sebagai panduan dalam menjaga persatuan, keadilan, kesejahteraan, dan pemberantasan korupsi.

Dengan demikian, model penguatan pendidikan antikorupsi dapat dirumuskan sebagai integrasi kurikulum, budaya sekolah, keteladanan, dan partisipasi warga sekolah. Kurikulum memberi dasar pengetahuan, budaya sekolah membentuk kebiasaan, keteladanan memperkuat contoh nyata, dan partisipasi menciptakan tanggung jawab bersama. Model ini membuat pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada hafalan konsep, tetapi menjadi perilaku yang hidup di lingkungan sekolah. Siswa diharapkan tumbuh sebagai pribadi yang

jujur, disiplin, adil, bertanggung jawab, dan berani menolak kecurangan. Faslah (2025) menegaskan bahwa aktualisasi nilai Pancasila diperlukan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera.

Kesimpulan dan Saran

Pendidikan antikorupsi perlu diperkuat melalui integrasi kurikulum dan budaya sekolah secara terpadu. Integrasi kurikulum dilakukan dengan memasukkan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, keberanian, dan kepedulian ke dalam tujuan, materi, metode, perangkat ajar, serta penilaian pembelajaran. Budaya sekolah menjadi ruang praktik nyata melalui keteladanan guru, aturan yang adil, larangan menyontek, transparansi kas kelas, kantin kejujuran, dan kegiatan OSIS. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi tidak berhenti sebagai teori, tetapi menjadi kebiasaan yang membentuk karakter siswa berintegritas. Sekolah disarankan menyusun program pendidikan antikorupsi yang terencana, konsisten, dan melibatkan seluruh warga sekolah. Guru perlu mengintegrasikan nilai antikorupsi dalam pembelajaran lintas mata pelajaran, bukan hanya pada PPKn atau Pendidikan Agama. Kepala sekolah dan tenaga kependidikan perlu menjadi teladan dalam kejujuran, kedisiplinan, keadilan, dan tanggung jawab. Selain itu, sekolah perlu memperkuat budaya antikorupsi melalui pembiasaan, kegiatan partisipatif, transparansi, serta kerja sama dengan orang tua agar nilai antikorupsi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Bashith, A. (2015). Reorientasi Pengembangan Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Menuju ASEAN Community. *Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 25(4), 44–58. <https://repository.uin-malang.ac.id/>
- Faslah, R. (2025). *Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup berbangsa (pertama)*. <https://repository.uin-malang.ac.id/>
- Gufron. (2022). Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Islam untuk Membangun Zona Integritas di Kalangan Mahasiswa Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Laporan Penelitian, Nip 1969030819999031002*.
- Hady, M. S., Prastyo, A. T., Bakar, A., Faslah, R., Malik, A., Alam, F., Barkah, Q., Himmatin, U., Nuyulis, I., Puspitasari, N., Zulkifli, M., & Ghani, A. (2025). Cultural transformation: religious moderation from manuscripts heritage to living tradition in Indonesia and Malaysia. *Cogent Education*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2556891>
- Kholid, I., Rahayu, R., Fathony, M. H., Anwar, R., Guru, P., Ibtidaiyah, M., Guru, P., Ibtidaiyah, M., Guru, P., Dasar, S., Nahdlatul, U., Kalimantan, U., Islam, P. A., Subang, H., Syariah, E., & Keluarga, H. (2025). STRATEGI DAN TANTANGAN INTEGRASI NILAI ANTIKORUPSI DALAM KURIKULUM MERDEKA: KAJIAN SISTEMATIK LITERATUR. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 12(2), 487–497. https://jurnal.citrabakti.ac.id/index.php/jil/article/view/5378?utm_source
- Komalasari, K., & Saripudin, D. (2015). Integration of Anti-Corruption Education in School ' s Activities. *American Journal of Applied Sciences*, 12(6), 446–450. <https://doi.org/10.3844/ajassp.2015.445.451>

- Mulyoto, G. P. (2020). Pengembangan modul praktikum matakuliah Pancasila dengan model project citizen untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada mahasiswa. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 67–80. <https://repository.uin-malang.ac.id/>
- Najih, M. dan, & Wiryani, F. (2021). Perspectives On Integrating Anti-Corruption Curriculum In Indonesian Secondary School Education. *Eurasian Journal of Educational Research*, 93, 407–424. <https://doi.org/10.14689/ejer.2021.93.20>
- Siregar, A. A., & Chastanti, I. (2022). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 9(1), 13–22. [file:///C:/Users/ACER/Downloads/admin,%7B\\$userGroup%7D,+13-22+Ahmad+Ansyari+Siregar.pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/admin,%7B$userGroup%7D,+13-22+Ahmad+Ansyari+Siregar.pdf)
- Tharaba, M. F. (2020). Mencari Model Pendidikan Karakter. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 66–81. <https://repository.uin-malang.ac.id/>
- Wahyuni, E. N. (2011). Perempuan dan korupsi. *Jawa Pos*, 23. <https://repository.uin-malang.ac.id/>
- Wirabhakti, A. (2020). Integrasi Nilai Anti Korupsi dalam Kurikulum Sekolah dengan Pendekatan Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal At-Tadbir*, 30(2), 173–183. https://media.neliti.com/media/publications/410404-integrasi-nilai-anti-korupsi-dalam-kurik-2bd3195f.pdf?utm_source
- Yuliani, N., & Muslim, A. (2024). Integrasi Kebijakan Pendidikan Antikorupsi dengan Kebijakan Pendidikan Karakter. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 12(2), 143–155. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma/article/view/12291>